

Politik Identitas Kelompok *Subaltern* Pesantren Waria Al Fatah Kotagede

Yogyakarta

Naufal Zahra Safira Gunawan¹, Wiwi Widiastuti², Fitriyani Yuliawati³

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Siliwangi

naufal.zahra101@gmail.com; wiwi.widiastuti@unsil.ac.id;

fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id;

Abstrak

Terdapat Pesantren khusus waria yang bernama Pesantren Al Fatah yang terletak di Kotagede Yogyakarta. Politik identitas yang dimiliki waria sebagai kelompok *subaltern* mengharuskan waria di pesantren ini memiliki kebertahanan dari segala macam stigma negatif dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini pun menjadi unik untuk diteliti karena tidak mudah dalam perjalanan pesantren maupun santri waria di dalamnya, adanya persoalan – persoalan dari beberapa lapisan masyarakat meneguhkan pesantren ini serta santri waria untuk bisa tetap bertahan untuk bisa mendapatkan hak sebagaimana manusia biasa lainnya. Dengan kehadiran pesantren khusus waria ini berpengaruh sedikit demi sedikit terhadap stigma waria khususnya di Yogyakarta, tentu faktor perilaku positif dengan mengangkat secara normatif nilai agama dan dapat membaurnya waria dengan masyarakat sekitar sangatlah berdampak besar. Namun tidak secara sepenuhnya berjalan dan tercapai karena masih adanya faktor yang mempengaruhi terutama di individu waria itu sendiri yang terkadang sulit untuk bekerjasama, hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi serta pendidikan yang dimiliki oleh waria.

Kata Kunci: Politik Identitas; Waria, Pesantren Al Fatah, *Subaltern*

Abstract

There is a special boarding school for transvestites called Pesantren Al Fatah located in Kotagede, Yogyakarta. The politics of identity possessed by transvestites as a *subaltern* group requires that transsexuals in this pesantren have the resilience of all kinds of negative stigma and discrimination in social life. confirmed this pesantren as well as transvestite students to be able to stay afloat to be able to get rights like other ordinary humans. With the presence of this special pesantren for transgender, it has gradually influenced the stigma of transgender, especially in Yogyakarta, of course the positive behavior factor by normatively elevating religious values and being able to mingle transgender with the surrounding community has a huge impact. However, it is not fully implemented and achieved because there are still influencing factors, especially among the transgender themselves, who sometimes find it difficult to cooperate, this cannot be separated from the economic and educational factors that waria have.

Keywords: Politics Identity; Transgender; Al Fatah Pesantren; *Subaltern*;

Pendahuluan

Berangkat dari arus global fenomena sosial yang semakin berkembang tentang isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Stigma negatif yang melekat terhadap kelompok LGBT khususnya transgender mengakibatkan segala bentuk perilaku diskriminasi dan kekerasan dialami oleh transgender atau lebih akrab disebut waria, banci, bencong atau wadam. Perilaku diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh waria ini disebabkan dalam segi penampilan, dimana yang seorang pria berpenampilan seperti wanita masih menjadi hal tabu untuk diterima, terutama di negara yang bukan memiliki paham liberalis seperti Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hal ini juga menjadi faktor terkuat alasan mengapa kelompok LGBT khususnya waria sulit diterima dalam masyarakat. Tentu hal ini juga tidak bisa terlepas dari segala bentuk nilai dan norma yang terkonstruksi dalam masyarakat. permasalahan yang dihadapi oleh waria dalam

kehidupannya di dalam masyarakat terus membelenggu waria dalam proses perjuangan Hak Asasi manusia, (1) masih sulitnya mendapatkan hak hidup seperti manusia lainnya karena stigma negatif yang melekat dengan identitas yang dimiliki waria, waria mendapatkan diskriminasi dan penolakan dari mulai unit terkecil yaitu keluarga sampai dengan masyarakat secara luas. (2) waria masih sulit dalam mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga perlindungan terhadap waria dari bentuk kekerasan pun belum ada, masih banyak waria yang bekerja sebagai pekerja seks yang memiliki risiko besar dan memperburuk citra waria itu sendiri. (3) hak sebagai warga negara belum terpenuhi dengan masih banyaknya waria yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini disebabkan waria mengalami penolakan oleh keluarganya sedangkan dalam mengurus KTP membutuhkan kartu keluarga dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Fenomena waria di Indonesia tidak bisa terlepas dari fenomena atau peristiwa yang terjadi secara global, pada tahun 2006 adanya deklarasi yang bernama The Yogyakarta Principles yang diinisiasi oleh tokoh – tokoh HAM dunia. Isinya membahas untuk usaha mengakhiri diskriminasi atas dasar gender dan orientasi seksual.

Secara identitas waria harus melakukan sikap kebertahanan dalam kehidupan sehari – harinya, karena pada dasarnya waria berusaha membentuk suatu identitas yang baru dalam masyarakat. “Dalam tinjauan politik identitas pun waria sebagai kelompok yang memiliki tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri” (Alfaqi, 2016).

Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan – perbedaan yang didasarkan atas asumsi – asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primodialisme dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa (Abdillah. 2002).

Saat membahas tentang identitas maupun politik identitas tentu tidak dapat dipisahkan dengan kajian kelompok identitas tertentu. Dalam hal ini kelompok waria dapat dikatakan sebagai kelompok *subaltern*. politik *subaltern* ini sangat bisa menggambarkan kondisi yang dialami waria dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. “Istilah Subaltern itu sendiri merupakan sekelompok orang yang termarginalkan dan tereksklusi dalam ranah publik” (Putra, 2015).

Waria merupakan kelompok yang mengalami diskriminasi dalam tatanan kehidupan masyarakat seperti kelompok etnis, agama, gender dan lain sebagainya, kelompok *subaltern* mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat, elit maupun negara, sehingga haknya sebagai manusia tidak dapat terpenuhi itu termasuk dalam kelompok subaltern atau dapat dikatakan dalam kajian *subaltern* membahas tentang kelompok inferior yang tertindas oleh kelompok yang lebih superior atau dominan. Dalam kajian politik identitas tidak bisa terlepas dari perjuangan untuk

membela, mempertahankan suatu identitas dengan berjuang mendapatkan hak sebagai manusia pada umumnya. Diskriminasi dan kekerasan yang sering menimpah kaum waria menjadi suatu momentum lahirnya gerakan untuk menuntut hak untuk waria. Dalam sejarah keberadaan waria diawali sejak zaman Mesir Kuno tahun 1478-an yang dikenal dengan sebutan *Galli*. Setelah itu pada zaman kerajaan di Perancis yaitu Henry III berpakaian seperti wanita yang menandakan sebagai simbol dari keagungan, hal ini dikenal sebagai lintas busana. Pada zaman pertengahan eksistensi transgender dan lintas busana semakin berkembang di di barat sampai pada periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II, waria mendapatkan peran sebagai mata – mata dari negara Nazi Jerman walau pada akhirnya waria diperlakukan dengan tidak baik. Pada masa modern, banyak terbit buku yang membahas tentang fenomena waria dengan diiringi dengan undang – undang tentang transgender yang diterbitkan pada tahun 1999 di Inggris.

Kondisi yang terjadi terhadap waria di Indonesia membuat kelompok waria harus memiliki jiwa keberanian dan inisiatif untuk dapat mengorganisir berbagai tujuan dan kepentingan kelompoknya. Salah satu bentuk upaya pengorganisasian yaitu, terdapat pesantren yang dikhususkan untuk waria yaitu Pesantren waria Al Fatah yang terdapat di wilayah Kotagede Yogyakarta. Sejak awal pendiriannya pada tahun 2006 yang diinisiasi oleh seorang waria bernama Maryani dan seorang kyai bernama K.H. Hamroli Harun yang pada awalnya mengalami keresahan pada saat Yogyakarta ditimpa gempa bumi pada tahun 2006 banyak waria yang menjadi korban meninggal dunia, sedangkan hampir semua waria saat itu tidak memiliki keluarga untuk mengurus jenazah. Hal ini lah yang menjadi ide awal untuk mendirikan Pesantren Waria Senen – Kemis atau sekarang bernama Pesantren Waria Al Fatah. Tentu dari awal pendirian sampai sekarang keberadaan pesantren waria Al Fatah ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal

ini juga yang membuat Pesantren Waria Al Fatah ini tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari internal pesantren maupun dari eksternal pesantren. Seperti pada tahun 2016, Pesantren Waria Al Fatah mengalami peristiwa besar yang membuat Pesantren Waria Al Fatah tutup serta aktifitasnya terhenti untuk sementara setelah adanya penggerudukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta yang menginginkan Pesantren Waria Al Fatah untuk ditutup, karena adanya isu tentang fikih waria yang diajarkan di pesantren, hal ini sedikit banyak mempengaruhi keberadaan Pesantren Waria Al Fatah dan menjadi perhatian khusus baik dalam lingkup nasional bahkan sampai lingkup internasional.

Dinamika dan permasalahan yang dialami oleh Pesantren Waria Al Fatah dan waria ini dapat dijadikan titik balik bagi waria untuk dapat mempresentasikan identitasnya dalam masyarakat atau bahkan dapat mendekonstruksi nilai dalam masyarakat untuk menerima identitas

dan mengubah stigma yang tertanam dalam masyarakat dengan menggunakan alat kepentingan yaitu identitas agama dan label pesantren yang melekat pada kelompok waria.

Metode

“Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian” (Sugiyono, 2016).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah yang memiliki tujuan menafsirkan fenomena yang ada terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen yang paling penting. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal ilmu dan pengetahuan tentang apa yang diteliti dan juga teori yang dapat digunakan saat mengidentifikasi masalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk dijadikan alat penafsiran yaitu menggunakan

pendekatan fenomenologi, dimana fenomenologi itu sendiri merupakan pendekatan yang menjelaskan atau menjabarkan suatu fenomena dalam realitas kehidupan. “Menurut Schutz, fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus kesadaran” (Campbell, 1994).

“Fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri” (Creswell, 2013).

Pendekatan lain dalam kajian ilmu politik yang digunakan sebagai alat penafsiran yaitu pendekatan gender, hal ini di pilih karena waria dianggap bertolak belakang dengan nilai – nilai yang terkonstruksi dalam masyarakat tentang ciri serta perilaku dari laki – laki dan perempuan.

“Pendekatan gender adalah sebuah proses imitasi dan

pengulangan performativitas yang tidak berhenti. Bisa jadi laki – laki yang diharuskan bergaya maskulin merupakan imitasi dari anggapan – anggapan tradisional yang terkonstruksi dan menjadi nilai dari menjadi seorang laki – laki. Dengan kata lain, tidak ada keaslian dari menjadi seorang maskulin atau feminine, karena itu hanyalah nilai – nilai yang terus terulang selama – tahun sehingga menjadi laki – laki yang maskulin dan perempuan feminine yang dianggap alamiah” (Setyorini, 2011, dalam Jurnal Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma, Inesty Kartikaningdryani).

Selain itu dalam penelitian ini dapat diambil makna bahwa adanya tujuan dan upaya dari kelompok waria di Pesantren Waria Al Fatah untuk diakui dan diterima secara identitas dalam masyarakat, namun dengan itu harus berjalan lurus dengan konstruksi nilai yang ada di dalam masyarakat, maka dari itu kelompok waria di Pesantren Waria Al Fatah harus melakukan dekonstruksi nilai dalam masyarakat

agar waria secara identitas dapat diakui dan diterima. Dekonstruksi itu sendiri artinya meruntuhkan semua yang sudah terbangun untuk dibangun (konstruksi) kembali dengan nilai – nilai yang baru. Menurut Derrida dapat juga diartikan sebagai oposisi - oposisi biner, misalnya, oposisi biner itu seperti badan dan jiwa, maskulin dan feminim, laki – laki dan perempuan, siang dan malam, timur dan barat dan seterusnya. Dengan adanya oposisi biner ini, maka ada hegemoni makna dari salah satu kutub dan kutub lain menjadi marginal. Dekonstruksi juga bisa dijelaskan sebagai suatu proses pembacaan yang meminati yang terpinggirkan. Dalam konteks oposisi biner, maka semua yang dimarginalisasikan dalam oposisi biner itu diminati. Dalam penelitian maka hal – hal yang selama ini dianggap salah tidak sesuai dengan nilai – nilai dikaji dan diteliti agar ada keberanian bersuara untuk mempresentasikan dirinya. Dalam hal ini dekonstruksi melihat suatu hal dari perspektif yang berbeda dari suatu hal. Derrida cenderung mengatakan makna itu

tidak bisa diputuskan, artinya tidak ada makna yang dapat dinilai baik maupun buruk. Seperti dalam kasus waria mengacu pada pemikiran Derrida bahwa waria dapat dilihat dari perspektif lain bukan hanya dari perspektif bahwa waria itu merupakan penyimpangan dari nilai atau erat kaitannya dengan hal yang negatif. Maka dari itu konstruksi stigma atau nilai dalam masyarakat bagi waria sangatlah penting dengan melakukan dekonstruksi nilai itu sendiri.

Pembahasan

Gambaran Umum Waria dan Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta

Pesantren Waria Al Fatah merupakan lembaga pendidikan dan belajar mengajar (madrasah) yang dikhususkan untuk para waria, transgender atau transeksual untuk mendapatkan edukasi dan kebebasan dalam beribadah. Selain itu pesantren ini bukan hanya fokus dalam bidang agama tetapi juga dalam bidang – bidang lainnya seperti sosial, politik, kemanusiaan, budaya dan lain sebagainya. Pada awalnya banyak

yang menyangka bahwa pesantren khusus waria ini sebagai tempat untuk rehabilitasi atau penyembuhan bagi waria atau transgender untuk kembali pada kodratnya sebagai laki – laki lewat nilai – nilai agama Islam yang diajarkan, tetapi dari awal berdirinya pesantren waria ini bukan untuk tujuan rehabilitasi tetapi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan spiritual bagi waria untuk mengenal Tuhan dan beribadah dengan nyaman tanpa rasa takut dan khawatir.

Pendirian Pesantren Waria Al Fatah ini tidak terlepas dari peristiwa gempa bumi yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2006. Diinisias oleh seorang waria bernama Maryani dan dibantu oleh seorang Kyai bernama KH. Hamroli Harun yang pada saat setelah gempa bumi mengguncang Yogyakarta, mengundang waria dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan doa bersama di Yogyakarta. Pada awalnya pesantren ini terletak di rumah Maryani di daerah Jagalan, Notoyudan Yogyakarta dan diberi nama Pesantren Senin – Kemis, dikarenakan aktifitas pesantren

dilaksanakan pada hari senin dan kamis. “Pada tanggal 8 Juni 2008, Pesantren Waria Al Fatah diresmikan dengan dihadiri oleh anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta” (<https://kumparan.com/ardhana-pragota/shinta-ratri-merawat-iman-para-waria-yogya>, diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 13.17)

Pada tanggal 12 Januari 2011 Pesantren Waria Al Fatah memiliki akta notaris atas nama notaris Suprayatun Sujipto, S.H dengan nomor akta 21, dimana merupakan bentuk legalitas paling awal dalam mendirikan pesantren waria ini. Selain itu Pesantren Waria Al Fatah memiliki nota kesepahaman dengan Lembaga Bantuan Hukum dan perguruan tinggi seperti UIN Sunan Kalijaga, Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan UNISNU Jepara sebagai bentuk kerjasama dua arah.

Identitas Waria, Agama, Elit Waria Sebagai *Broker* dan Dekonstruksi Nilai

Keberadaan pesantren khusus waria tentu memberikan ruang baru bagi waria untuk memenuhi

kebutuhan spiritualnya. Waria yang dianggap sebagai pelanggar nilai agama dan nilai sosial yang terkonstruksi dalam masyarakat, menjadi hal yang menarik untuk selalu diketahui. Namun, selain tujuan pendirian pesantren sebagai fasilitas untuk waria belajar tentang agama, tentu adanya kepentingan lain yang menyangkut tentang identitas waria. Stigma atau penilaian yang melekat terhadap waria yaitu selalu berkonotasi negatif, karena memang waria dinilai sebagai penyimpangan perilaku baik secara seksual, sosial dan agama yang masing – masing memiliki standarisasi yang terkonstruksi dalam masyarakat serta berlaku dalam masyarakat yang dianggap baik. Tentu saat membicarakan politik identitas tidak dapat dipisahkan dengan upaya untuk mencapai kepentingan dan tentu saja dalam proses upaya tersebut dibutuhkan alat kepentingan itu sendiri agar apa yang ingin dicapai lebih mudah untuk diwujudkan.

Dalam hal ini kelompok waria yang merupakan kelompok *subaltern* tentu tidak bisa untuk

berdiri maupun berjuang sendiri, sesuai dengan yang dikatakan Gayatri Spivak bahwa kaum *subaltern* tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisinya, sehingga diperlukan kaum intelektual yang sering dianggap sebagai “wakil” kelompok *subaltern*. hal ini dapat dilihat bawa Pesantren Waria Al Fatah memiliki afiliasi atau jaringan dengan beberapa aktor eksternal yang dapat dikatakan berasal dari kelompok *civil society*. Selain itu Pesantren Waria Al Fatah yang memiliki label “pesantren” yang tentunya berkaitan dengan agama memiliki keuntungan tersendiri, dimana untuk masyarakat di Indonesia sendiri hal – hal yang berkaitan dengan agama menjadi hal yang pasti dianggap baik. Dalam hal ini Pesantren Waria Al Fatah dapat dikatakan memutar perspektif tentang waria dan agama itu sendiri. Tentu hal ini menjadi sangat unik apabila dibahas dan dikaji lebih lanjut, label agama yang dilekatkan kepada komunitas waria ini yang pada dasarnya seperti berlawanan, dimana waria dianggap buruk dan memiliki stigma negatif karena

menyalahi nilai dan norma sedangkan agama dipandang sebagai hal yang baik dan suci bagi manusia yang meyakini. Tak khayal dapat dikatakan bahwa waria di pesantren waria Al Fatah menggunakan identitas agama sebagai jalan dan alat untuk mewujudkan kepentingannya dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal yang berkaitan dengan agama selalu dipandang baik sehingga penggunaan label agama pada proses mencapai kepentingan tidak dapat disalahkan karena kepentingannya pun suatu hal yang baik demi penegakan hak asasi manusia. Di dalam agama pun tentu kajian tentang hubungan antara manusia dan hak asasi manusia menjadi hal yang mutlak untuk berjalan sebagaimana mestinya.

Analisis lain bahwa agama menjadi alat kepentingan dapat dilihat dari berbagai perhatian yang didapat oleh pesantren waria Al Fatah, tidak dapat dipungkiri hal yang unik adalah label agama yang melekat tentang adanya pesantren khusus waria satu – satunya di dunia, hal ini menjadi fenomena tersendiri karena hubungan antara agama

dengan waria yang termasuk LGBT yang dimana setiap tahunnya isu LGBT dengan nilai dan norma agama selalu menjadi hal yang diperdebatkan, apalagi di Indonesia isu pergulatan antara LGBT dengan agama selalu panas, bahkan dapat berkembang menjadi isu politik.

Kelompok waria di Yogyakarta ada yang dikenal sebagai elit waria, seorang waria dapat dikatakan sebagai elit waria dikarenakan memiliki kemandirian dan kemampuan mempresentasikan diri serta mengorganisir individu menjadi kelompok untuk memperjuangkan kepentingan. Kelompok waria tidak akan mendapatkan akses dasar dengan mudah apabila tidak ada yang memperjuangkannya, maka dari itu seorang waria atau beberapa waria yang memperjuangkan dapat dikatakan sebagai elit waria. “Dalam hal ini, waria sebagai *subaltern*, sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus komunitasnya untuk mengatasi penekanan dan pendiskriminasian dari pihak lain” (Widayanti, 2009)..

Di Pesantren Waria Al Fatah tentu seseorang yang dapat dikatakan elit waria yaitu pimpinan pesantren Shinta Ratri. Peran dari elit waria seperti Shinta Ratri dapat disebut sebagai elit *broker* atau dikenal sebagai perantara, artinya elit *broker* dapat dikatakan sebagai ujung tombak dan titik masuk untuk aktor – aktor eksternal pesantren waria untuk mengetahui dan mengenal kondisi internal waria seperti apa. Untuk mendapatkan segala akses waria tentu sangat membutuhkan elit *broker* begitu pun aktor eksternal yang ingin atau akan melakukan kajian, kegiatan maupun penelitian yang menyangkut tentang komunitas waria seperti mahasiswa yang melakukan penelitian, komunitas atau organisasi yang memiliki program pemberdayaan waria dalam bentuk sosialisasi atau bahkan sekedar untuk konten berita dan informasi .

Kemampuan elit waria sebagai elit *broker* untuk mengakses pelayanan dan relasi menjadi modal untuk politik identitas pesantren waria selain penggunaan agama sebagai alat kepentingan untuk

mendapatkan pengakuan keberadaan bahkan kekuasaan secara penuh terhadap identitasnya. Dalam kelompok waria elit *broker* menempati posisi strategis, artinya ada suatu nilai – nilai yang dihormati dan dibutuhkan oleh waria sebagai panutan dalam menjadlani kehidupan sebagai waria. “Nilai – nilai tersebut merupakan sumberdaya (modal) bagi seseorang waria untuk memperoleh kekuasaan sehingga identitasnya mampu berada pada posisi strategis, posisi strategis ini menempatkan waria sebagai *broker* dan dapat diperoleh melalui penguasaan akses, posisi formal dalam komunitas waria dan kepemilikan pengaruh” (Widayanti, 2009).

Keberadaan pesantren waria ini tentu berangsur – angsur mempengaruhi citra yang dimiliki waria terutama dalam komoditas kecil yaitu di lingkungan masyarakat sekitar pesantren waria. Pengajaran di pesantren memfokuskan pada tingkah laku para waria untuk bisa lebih mematuhi nilai kesopanan dan kesantunan, hal ini pun memang sudah diakui oleh masyarakat sekitar bahwa waria yang menjadi santri di

pesantren tingkah lakunya berbeda dengan waria yang biasa ditemui di jalanan terutama yang bekerja sebagai PSK dan pengamen. Waria yang menjadi santri dianggap lebih religius juga perilaku dan tutur bahasanya lebih sopan sehingga masyarakat pun memiliki penilaiannya tersendiri terhadap waria yang ada di pesantren. Selain itu pun waria yang menjadi santri membaaur dengan masyarakat dan selalu berperan dalam masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal waria seperti apa serta sudah bisa menerima dan mengakui keberadaan waria di pesantren waria Al Fatah.

Pengakuan dan penerimaan secara identitas waria itu sendiri dinilai sulit untuk di dapatkan, karena hal ini menyangkut dengan konstruksi nilai – nilai yang sudah ada di masyarakat. Maka dari itu apabila waria ingin diakui dan diterima secara identitas harus melalui proses dekonstruksi nilai – nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Namun tentu proses dekonstruksi tidak bisa dilakukan secara instan tetapi memerlukan waktu yang sangat panjang.

Membongkar lalu membangun kembali bukan hanya sampai tahan itu tetapi harus pada proses berkelanjutan dengan cara rekonstruksi identitas waria itu sendiri maupun rekonstruksi nilai – nilai yang ada di masyarakat. Seperti yang dikatakan dalam teori dekonstruksi Derrida bahwa makna dari sesuatu itu sebenarnya tidak dapat ditentukan, maka dari itu waria khususnya Pesantren waria Al Fatah harus dapat memanfaatkan kondisi untuk mempresentasikan identitas sebagai waria yang bertolak belakang dengan stigma negatif yang melekat pada waria sampai saat ini menggunakan alat maupun fasilitas yang di dapatkan semenjak berdirinya Pesantren Waria Al Fatah.

Tentu untuk waria sudah dapat diterima kehadirannya tanpa adanya perilaku diskriminasi dari masyarakat sekitar merupakan suatu kabar mengembirakan bagi komunitas waria, hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan pesantren khusus waria Al Fatah yang sejak pendiriannya mengupayakan penerimaan waria dalam masyarakat dengan

memfokuskan pada ajaran – ajaran agama yang dimana agama merupakan hal yang pasti dianggap baik oleh masyarakat sehingga perilaku maupun etika yang dimiliki waria terpengaruh dengan nilai – nilai agama dan lebih mudah diterima di dalam masyarakat, maka dari itu ada ruang yang lebih terbuka bagi kelompok waria untuk keluar dari *subaltern*.

Kesimpulan

Melalui penelitian ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sekarang ini sudah mulai terbuka dan menerima keberadaan waria walaupun masih dalam komoditas kecil yaitu masyarakat lingkungan pesantren. Masyarakat menilai secara subjektif atas pribadi waria itu sendiri yang menyangkut dengan perilaku dan kemampuan waria dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat yang memiliki nilai – nilai tertentu yang dianggap baik, seperti nilai kesopanan tingkah laku dan kesantunan bahasa, jadi masyarakat tidak menilai dari identitasnya sebagai waria, maka dari itu juga waria memang masih

dianggap aneh oleh masyarakat tetapi di satu sisi masyarakat mulai menghargai keberadaan waria sehingga dapat membaaur satu sama lain.

Perihal penerimaan secara identitas dan pengakuan identitas sebagai waria memang sangat kecil kemungkinan karena bersinggungan dengan nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui proses dekonstruksi nilai agar apa yang sudah ada di dalam masyarakat di tata ulang dengan cara membongkar terlebih dahulu, namun proses dekonstruksi butuh waktu yang sangat lama. Selain itu rekonstruksi identitas waria pun harus tetap diupayakan agar apa yang menjadi tujuan dari waria di Pesantren Waria Al Fatah dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

Aditya, Mohammad Rifan. (2014). Ketika Waria Menjadi Santri di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Jagalan Notoyudan Kota Gede Yogyakarta Studi Kasus Empat Santri Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fattah. Skripsi. Program Antropologi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Alfaqi, Mifdal Zusron. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Sera Solidaritas. Jurnal. Jurusan Pertahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ardi, Wigke Capri. (2010). Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Gay. POLGOV UGM. Yogyakarta.
- Bachri, Bahtiar. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar – Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Carrette, J.R. (2010). Agama Seksualitas Kebudayaan Esai Kuliah dan Wawancara Foucault. Ter.Indi Aunullah. Jalsutra. Yogyakarta.
- Creswell, JW. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi ketiga (terj). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Farhan, Nurul. (2014). Dinamika Pondok Pesantren Waria Al Fatah Di Dusun Notoyudan, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gunawan, Aditya Arif. (2016). Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Bagi Komunitas Waria (Studi Terhadap Pembubaran Pondok Pesantren Waria Al Fatah Senin – Kemis Kotagede Bantul Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Habibi, Muhammad. (2017). Analisa Politik Identitas di Indonesia. Jurnal. FISIP Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Hartoyo dkk. (2014). Sesuai Kata Hati Kisah Perjuangan 7 Waria. Rehal Pustaka. Jakarta.
- Husaini, Adian. (2015). LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya. Institute For The Study Of Islamic Thought And Civilizations (INSISTS). Jakarta.
- Kartikaningdryani, Inestya. (2019). Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma. Jurnal. Pemikiran Sosiologi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Latiefa, Umi. (2013). Pesantren Waria Dan Konstruksi Identitas (Studi tentang Waria dalam Membangun Identitasnya melalui Pesantren Waria Al Fatah Notoyudan, DIY). Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Listyani, Yulinda Nurul. (2015). Pembinaan Keagamaan Bagi Santri Waria Di Pesantren Al Fatah Kotagede Yogyakarta. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Maryanuntoro, Galih. (2016). Keberagaman Santri Waria (Studi Kasus di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Kotagede Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Morton, Stephen. (2008). Gayatri Spivak: Etika, Subaltern dan Kritik Penalaran Postkolonial. Ter.Wiwin Indiarti. Pararaton. Yogyakarta.
- Nadia, Zunly. (2005). Waria Laknat atau Kodrat. Marwa. Yogyakarta.
- Nasrudin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin. (2018). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Jurnal. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum. (2005). Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Putra, Leonardus J. Politik Subaltern 'Strategi Vinolia Wakijo Sebagai Aktor Intermediary Dalam Merepresentasikan Waria dan Pengakuan Atas Gender Ketiga. Jurnal. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rozi, Syafuan dkk. (2019): Politik Identitas: Probelematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sadewo, Galih Ari. (2017). Peran Pondok Pesantren Waria Al Fatah Dalam Membangun Citizenship Bagi Waria. Skripsi. Manajemen dan Kebijakan Publik FISIP Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Bestor, Victoria, Theodore C Bestor & Akiko Yamagata, ed (2011). Routledge Handbook of Japanese Culture and Society. Taylor & Francis. ISBN 978-1-136-73627-8 (dalam Wikipedia).

Widayanti, Titik. (2009). Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Waria. POLGOV UGM. Yogyakarta.

“Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak – Hak LGBT di Indonesia”
<https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia> (Online). [diakses pada 13 Februari 2020]. [Tersedia].

“Mengenal Sejarah PRIDE Month, Bulan Spesial Bagi Kelompok LGBTQ”
<https://www.idntimes.com/science/discovery/belinda-belinda/sejarah-pride-month-kelompok-lgbtq-c1c2> (Online). [diakses pada 13 Februari 2020]. [Tersedia].

“Prinsip – Prinsip Yogyakarta”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip-Prinsip_Yogyakarta (Online). [diakses pada 14 Februari 2020] [Tersedia].

“ODHIV dan Transgender Terlupakan selama Pandemi COVID-19”
<https://tirto.id/odhiv-dan-transgender-terlupakan-selama-pandemi-covid-a9-f24o> (Online). [diakses pada 04 September 2020] [Tersedia].